



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN



**REVISI LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2023**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kecamatan Klambu merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-III pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Klambu Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Kecamatan Klambu Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Kecamatan Klambu. Kinerja Kecamatan Klambu diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Klambu Tahun 2023.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Kecamatan Klambu Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kecamatan Klambu pada tahun-



tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Klambu, Juni 2024

CAMAT KLAMBU

KABUPATEN GROBOGAN



RUSTAMAJI, S.S.T.P. M.SI.

Pembina, IV/a

NIP. 19871013 200602 1 002



DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja | 2 |
| C. Isu Strategis Perangkat Daerah | 4 |
| D. Landasan Hukum | 5 |
| E. Sistematika | 5 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 8 |
| A. Rencana Strategis | 8 |
| B. Rencana Kinerja Tahun 2023 | 20 |
| C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 | 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 33 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 35 |
| B. Realisasi Anggaran | 50 |
| C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 53 |
| BAB IV PENUTUP | 62 |
| LAMPIRAN | 64 |
| SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH | 65 |
| MATRIKS RENSTRA | 70 |
| SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | 120 |
| PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH | 131 |

BAB I PENDAHULUAN





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Klambu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas,



terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Grobogan mempunyai tugas:

- a. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

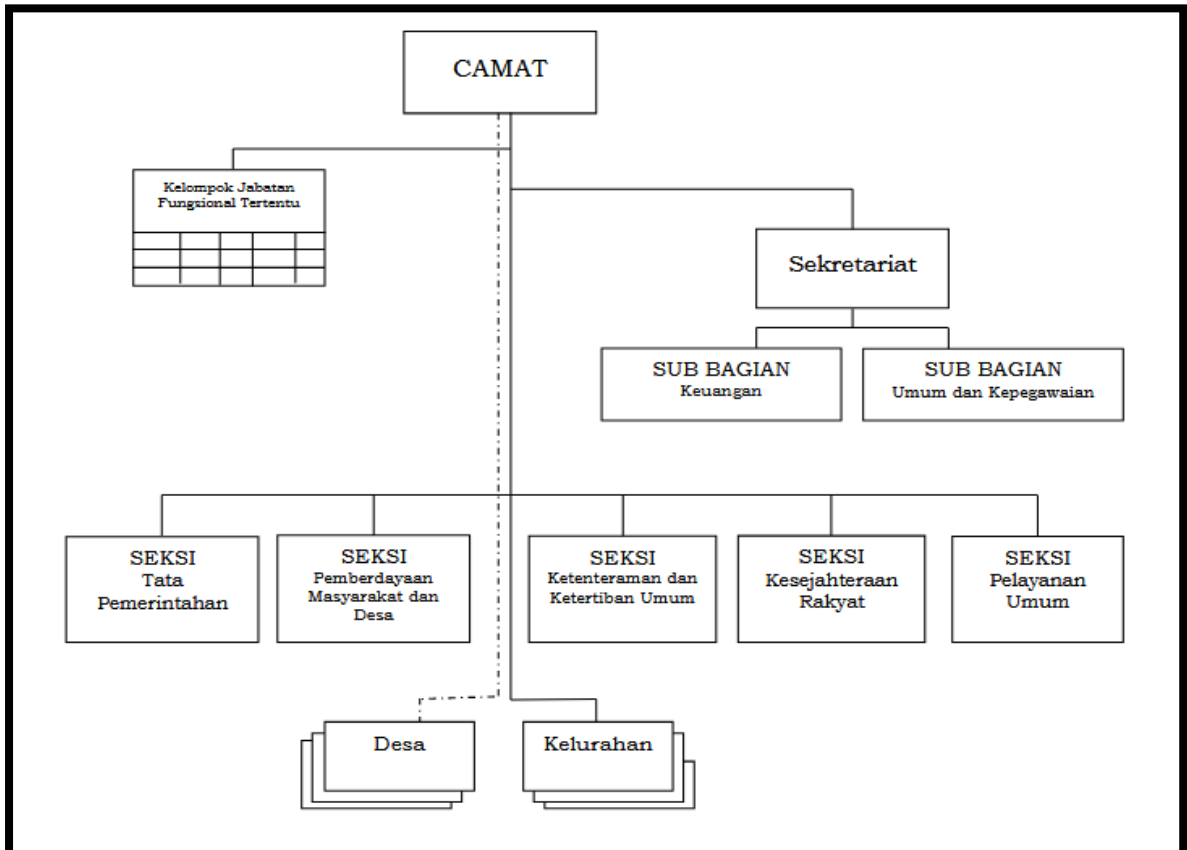
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Camat mempunyai fungsi :

- o penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- o pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- o pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;



- o pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- o pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- o pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- o pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- o pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
- o pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Seksi dan Sub Bidang. Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Kecamatan Klambu periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum di kecamatan melalui peningkatan kapasitas SDM bidang layanan, peningkatan sarana kelengkapan pendukung fasilitas pelayanan, penerapan standar pelayanan dan penambahan SDM;
2. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah melalui pendidikan dan pelatihan, pemenuhan standar lingkungan kerja, pengembangan stimulan kegiatan masyarakat dan memperkuat fungsi-fungsi koordinasi dan fasilitasi.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2023 mengacu pada Renstra Kecamatan Klambu periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan;



D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Klambu ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis
Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan. Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Grobogan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dan stakeholder.



Selanjutnya, Renstra Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan
Berbudaya”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing

Misi 2 : Membangun Infrastruktur sesuai Potensi Daerah, Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Resiko Bencana

Misi 3 : Memperkuat Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Unggulan Secara Merata, Berkualitas dan Berdaya Saing

Misi 4 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat

Misi 5 : Memperkuat Implementasi Nilai-Nilai Keimanan dan Budaya dalam Kehidupan Masyarakat



Perumusan tujuan dan sasaran Kecamatan Klambu mengacu pada Misi ke-1, yaitu :

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.”

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 sebanyak 1 tujuan dan 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA PADA TAHUN | | | | | |
|-----|---|---------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 1 | Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | a | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | Nilai IKM | B (76,70) | B (77,20) | B (77,70) | B (78,20) | B (79,70) |
| | | b | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Nilai SAKIP | B (63) | B (65) | BB (70) | BB (72) | BB (73,5) |

Sumber : Renstra Kecamatan Klambu periode 2021-2026



4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

| NO | TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM/KEGIAT AN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | PENJELASAN | | |
|----|--|---|--------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|
| | | | | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB |
| I. | Meningkatkan kapasitas SDM sarana dan Prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan | 1.1. Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | % | Hasil Penilaian Mandiri | Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100. | Camat |
| 1. | Meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat | Nilai LPPD | Nilai | Hasil Penilaian bagian Organisasi | Laporan Hasil Penilaian LPPD oleh Kemendagri. | Camat |
| A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | % | | Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100. | Kasi Pelayanan |



| | | | | | | |
|--|--|--|-------|--|--|--|
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | % | | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100 | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN | bulan | | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersusun Tepat Waktu | |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu | % | | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100 | |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Setel | | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terpenuhi | |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | % | | Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100 | |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ | | Jumlah Komponen | Unit | | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | |



| | | | | | | | |
|-------------|---|--|---|------|--|---|--|
| | Penerangan Bangunan Kantor | | Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | | | Bangunan Kantor Terpenuhi | |
| | Penyediaan bahan logistik kantor | | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Unit | | Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhi | |
| | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Unit | | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhi | |
| | Penyediaan Bahan/Material | | Jumlah Bahan/Material yang disediakan | Unit | | Jumlah Penyediaan Bahan/Material Terpenuhi | |
| | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Kali | | Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksana | |
| a.4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | % | | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100 | |
| a.4.1. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau | Unit | | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi | |



| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|--|--|--|
| | | | Bangunan Lainnya yang diadakan | | | | |
| a.5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Unit | | Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa | |
| a.5.1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia | Bulan | | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhi | |
| a.5.2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi | |
| a.5.3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor | Bulan | | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi | |
| a.6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | % | | Jumlah peralatan kantor kecamatan terpelihara dengan baik | |
| a.6.1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau | |



| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|-------|--|---|----------|
| | Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | terpelihara | | | Kendaraan Dinas Jabatan Terpenuhi | |
| a.6.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | Unit | | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terlaksana | |
| a.6.3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | Unit | | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi | |
| B. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP tetap | Bulan | | Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100 | Kasi PMD |
| b.1. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | % | | Jumlah hasil kegiatan koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang ditindaklanjuti dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100 | |
| b.1.1. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan | | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | Kali | | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | |



| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|------|--|---|----------------|
| | Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | | | | | |
| C. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM | | Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan | % | | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Kecamatan yang dilaksanakan dikali 100 | Kasi Trantibum |
| c.1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | | Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan di Kecamatan yang dilaksanakan | kali | | Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan di Kecamatan yang dilaksanakan | |
| c.1.1. | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan | | Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Kecamatan yang dilaksanakan | kali | | Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Kecamatan yang dilaksanakan | |



| | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Republik Indonesia | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Klambu Tahun 2023



B. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2023 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2023. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Klambu Tahun 2023 :

Tabel 2.3
Rencana Kerja Tahun 2023
Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan

| NO | TUJUAN | SASARAN | | INDIKATOR KINERJA | SAT. | TARGET |
|-----|---|---------|---|---|-------|---------|
| (1) | (2) | (3) | | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | Meningkatnya rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 77.20 % |
| | | 1.1 | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan | Nilai SAKIP | Nilai | B (65) |

Sumber : Rencana Kerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2023

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan



karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Pada tanggal 2 bulan Januari tahun 2023 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perjanjian Kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2023

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|---|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat | Meningkatnya Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 77,20 % |
| | Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Nilai SAKIP | Nilai | B (65) |

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Klambu Tahun 2023

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Kecamatan Klambu :



Tabel 2.5

Program dan Kegiatan Kecamatan Klambu Tahun 2023

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN |
|-------------|---|---|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 100% | Rp. 1.605.894.656 |
| a.1. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | 100% | Rp. 1.117.381.156 |
| a.1.1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN | 14 org/bl | Rp. 1.117.381.156 |
| a.2. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100% | Rp. 11.952.000 |
| a.2.1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 26 setel | Rp. 11.952.000 |
| a.3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp. 131.675.000 |
| a.3.1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan | 8 Paket | Rp. 4.669.000 |



| | | | | |
|-------------|---|---|-------------|------------------------|
| | Kantor | Bangunan Kantor yang disediakan | | |
| a.3.2. | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4 Paket | Rp. 32.380.000 |
| a.3.3. | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bahan/Material yang disediakan | 27 Paket | Rp. 31.626.000 |
| a.3.4. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | Rp. 63.000.000 |
| a.4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | 100% | Rp. 57.925.000 |
| a.4.1. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | 5 unit | Rp. 57.925.000 |
| a.5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp. 237.767.500 |
| a.5.1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia | 12 laporan | Rp. 108.450.000 |
| a.5.2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 laporan | Rp. 30.998.500 |
| a.5.3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 laporan | Rp. 98.319.000 |



| | | | | |
|-------------|--|--|--------------|-----------------------|
| a.6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | Rp. 49.194.000 |
| a.6.1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara | 5 unit | Rp. 16.799.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 unit | Rp. 12.895.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 unit | Rp. 19.500.000 |
| B. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP tetap | 100% | Rp. 16.153.500 |
| b.1. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 1 keg | Rp. 16.153.500 |
| b.1.1. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | 1 keg | Rp. 16.153.500 |



| | | | | |
|-------------|---|---|--------------|--------------------------|
| | Instansi Vertikal Terkait | | | |
| C. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap | 100% | Rp. 22.833.000 |
| c.1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan di Kecamatan yang dilaksanakan | 1 keg | Rp. 22.833.000 |
| c.1.1. | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Kecamatan yang dilaksanakan | 1 keg | Rp. 22.833.000 |
| | JUMLAH | | | Rp. 1.644.881.156 |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Klambu Tahun 2023

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);



3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada tanggal 3 bulan Oktober tahun 2023 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.6

**Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
Tahun 2023**

| NO | TUJUAN/SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|---|--------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat | Meningkatnya Rata - rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | % | 77,20 |
| | Meningkatnya Kualitas Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Nilai SAKIP | Nilai | B (65) |

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Klambu Tahun 2023

Dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.7

Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Klambu Tahun 2023

| NO. | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | ANGGARAN |
|-------------|---|--|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 100% | Rp. 1.815.749.500 |
| a.1. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | 100% | Rp. 1.320.386.000 |
| a.1.1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN | 14 org | Rp. 1.320.386.000 |
| a.2. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100% | Rp. 11.952.000 |
| a.2.1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut | Pengadaan Pakaian Dinas | 26 setel | Rp. 11.952.000 |



| | Kelengkapannya | Beserta Atribut Kelengkapannya | | |
|-------------|---|---|-------------|------------------------|
| a.3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp. 146.290.250 |
| a.3.1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | 8 Paket | Rp. 4.669.000 |
| a.3.2. | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 4 Paket | Rp. 33.280.000 |
| a.3.3. | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bahan/Material yang disediakan | 27 Paket | Rp. 31.641.250 |
| a.3.4. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | Rp. 76.700.000 |
| a.4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | 100% | Rp. 57.925.000 |
| a.4.1. | Pengadaan Sarana dan | Jumlah Sarana dan | 5 unit | Rp. 57.925.000 |



| | | | | |
|-------------|--|--|-------------|------------------------|
| | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | | |
| a.5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Rp. 224.052.250 |
| a.5.1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia | 12 laporan | Rp. 105.562.500 |
| a.5.2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 laporan | Rp. 22.398.250 |
| a.5.3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 laporan | Rp. 96.091.500 |
| a.6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | Rp. 55.144.000 |
| a.6.1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara | 5 unit | Rp. 22.749.000 |



| | | | | |
|-------------|--|--|--------------|-----------------------|
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 5 unit | Rp. 12.895.000 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 unit | Rp. 19.500.000 |
| B. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP tetap | 100% | Rp. 16.153.500 |
| b.1. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 1 keg | Rp. 16.153.500 |
| b.1.1. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | 1 keg | Rp. 16.153.500 |



| | | | | |
|--------|---|---|--------------|--------------------------|
| C. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap | 100% | Rp. 22.833.000 |
| c.1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan di Kecamatan yang dilaksanakan | 1 keg | Rp. 22.833.000 |
| c.1.1. | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan di Kecamatan yang dilaksanakan | 1 keg | Rp. 22.833.000 |
| | JUMLAH | | | Rp. 1.854.736.000 |

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Klambu Tahun 2023 (setelah perubahan)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran



diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Pengkategorian Capaian Kinerja

| No | Kategori/Interpretasi | Rata-Rata % Capaian |
|----|-----------------------|---------------------|
| 1 | Sangat Tinggi | $91 \leq 100$ |
| 2 | Tinggi | $76 \leq 90$ |
| 3 | Sedang | $66 \leq 75$ |
| 4 | Rendah | $51 \leq 65$ |
| 5 | Sangat Rendah | ≤ 50 |

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan



visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Klambu Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Klambu.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Klambu Tahun 2023

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian % | Kategori | Sumber Data |
|-----|--|-------------------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| a. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum | Nilai IKM | B (77,20) | B (82,41) | 106,75 % | Sangat Tinggi | Rata-rata Nilai IKM Triwulan I s/d IV |



| | | | | | | | |
|----|---|-------------|-----------|--------------|---------|------------------|------------------|
| | kepada masyarakat | | | | | | Tahun 2023 |
| b. | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Nilai SAKIP | B (65) | B (64,25) | 98,85 % | Sangat Tinggi | Dokumen SAKIP |

Uraian penjelasan tabel :

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klambu di tahun 2023 mencapai nilai 82,41 dan melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 77,20 sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 106,75 %. Termasuk dalam kategori capaian kinerja sangat tinggi

Indikator Nilai SAKIP

Nilai SAKIP Kecamatan Klambu merupakan nilai evaluasi yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dokumen pendukung lainnya yang dilaporkan ke Bagian Organisasi Setda Grobogan dan Inspektorat Kabupaten Grobogan. Diharapkan nilai SAKIP Kecamatan meningkat setiap tahunnya sehingga menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan yang semakin baik dan akuntabel. Dapat dilihat dari tabel di atas nilai hasil Evaluasi yang diperoleh ditahun 2023 adalah 64,25 selisih 0,75 point dibawah target nilai SAKIP yang ditetapkan dalam Renstra sebesar 65. Sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 98,85%, masih termasuk dalam kategori capaian kinerja sangat tinggi.



Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | 2022 | | | 2023 | | |
|-----|---|-------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian |
| a. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | Nilai IKM | B (76,70) | B (81,35) | (106,06) % | B (77,20) | B (82,41) | 106,75 % |
| b. | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Nilai SAKIP | B (63) | B (63,27) | 100,43 % | B (65) | B (64,25) | 98,85 % |

Uraian penjelasan tabel :

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klambu di tahun 2023 mencapai nilai 82,41 dengan capaian kinerja indikator sebesar 106,75 %. Capaian kinerja indikator ini melebihi tahun 2022 sebesar 106,06%.



Indikator Nilai SAKIP

Nilai hasil Evaluasi SAKIP yang diperoleh ditahun 2023 adalah 64,25 dengan capaian kinerja indikator ini sebesar 98,85%. Capaian kinerja indikator ini masih dibawah tahun 2022 yang mencapai 100,43%.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Kinerja Tahun 2023 | Target Akhir 2026 | Tingkat Kemajuan |
|----|---|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=4/5*100$ |
| a. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | Nilai IKM | B (82,41) | B (79,70) | (103,40) |
| b. | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Nilai SAKIP | B (64,25) | BB (73,5) | BB (87,42) |

Uraian penjelasan tabel :

Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan



Realisasi kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klambu di tahun 2023 mencapai nilai 82,41, sedangkan target realisasi di akhir tahun 2026 yang tertuang dalam Renstra sebesar 79,70. Hal ini menerangkan bahwa tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2026 telah mencapai 103,40%.

Indikator Nilai SAKIP

Realisasi kinerja hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Klambu di tahun 2023 mencapai nilai 64,25, sedangkan target realisasi di akhir tahun 2026 yang tertuang dalam Renstra sebesar 73,50. Hal ini menerangkan bahwa tingkat kemajuan yang dicapai pada tahun 2023 dibandingkan dengan target tahun 2026 baru mencapai 87,42%.

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten Grobogan lain

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2023 | Standar Nasional | % Capaian |
|-----|---|-------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | $6=4/5*100$ |
| a. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | Nilai IKM | B (82,41) | (94,76) | (86,97) |
| b. | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Nilai SAKIP | B (64,25) | A (80,54) | BB (79,78) |



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

| No. | Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % Capaian | Analisis Keberhasilan/ Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|-----|---|----------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| a. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | Nilai IKM | B (77,20) | B (82,41) | 106,75 % | Kesigapan dan komitmen aparatur | Arahan dan rapat internal secara berkala oleh pimpinan |
| b. | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Nilai SAKIP | B (65) | B (64,25) | 98,85 % | Komitmen dan Support dari Pimpinan serta Kerjasama dari Tim Internal Kecamatan | Monitoring dan evaluasi pimpinan untuk peningkatan kinerja |

Uraian penjelasan tabel :

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Klambu yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah



ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan Klambu dapat dilihat pada uraian sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat terhadap Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Kecamatan Klambu sebesar 82,41 berada pada kategori "BAIK". Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan publik oleh Kecamatan Klambu sudah baik, meski secara keseluruhan unsur pelayanan dinilai baik, tetapi masih terdapat unsur yang memiliki nilai yang rendah khususnya penanganan pengaduan pengguna layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah kecamatan harus segera mengelola dengan baik terkait layanan pengaduan dan masukan dari pihak penerima layanan.

Faktor pendukung keberhasilan Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Klambu antara lain :

1. Kesigapan dan komitmen para aparatur demi mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan yang cepat, cermat dan



sesuai dengan SOP serta standar pelayanan yang ada di Kecamatan Klambu. Pimpinan selalu memberikan arahan secara langsung dalam apel pagi dan rapat internal agar karyawan selalu mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat.

2. Inovasi Pelayanan di Kecamatan Klambu untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas Pelayanan, antara lain perpanjangan jam kerja pelayanan di hari Jum'at yang biasanya sampai pukul 13.30 menjadi s.d pukul 15.30.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja tahun anggaran 2022 yang disajikan oleh Kecamatan Klambu dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan capaian yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan nilai sebesar 64,25 dengan kategori B (Baik), Interpretasi bahwa yaitu system dan tatanan dapat diandalkan, memiliki sistem manajemen kinerja yang cukup baik.

Faktor pendukung keberhasilan indikator Nilai SAKIP antara lain :

1. Adanya Komitmen dan Support dari Pimpinan serta Kerjasama dari Tim Internal Kecamatan untuk meningkatkan kinerja sehingga nilai SAKIP Kecamatan bisa meningkat. Namun untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan dokumen SAKIP tetap diperlukan Pelatihan atau Bimbingan Teknis penyusunan dokumen SAKIP secara berkesinambungan mulai dari Pimpinan PD, Pejabat Eselon dan aparatur yang mengerjakan agar dapat menyajikan laporan kerjanya dengan baik.



2. Adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan dan Tim Internal Kecamatan Klambu setiap triwulan sebagai bahan evaluasi dan rencana tindaklanjut untuk perbaikan kinerja berikutnya.

Terhadap beberapa kekurangan, akan dilakukan perbaikan/solusi sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja.
2. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan evaluasi internal
3. Melakukan perbaikan terhadap pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya serta perbaikan dokumen yang signifikan sehingga data dan informasi bisa diandalkan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.7

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

| No. | Tujuan/ Sasaran | Indikator Kinerja | % Capaian | Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | % Capaian | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|-----|---|----------------------|--------------|---|--|--------------|----------------------------------|
| a. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | Nilai IKM | 106,75 % | | | | Menunjang |
| b. | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Nilai SAKIP | 98,85 % | | | | Menunjang |
| | | | | A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | 100% | Menunjang |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------|-----------|
| | | | | KOTA. | | | |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN | 100% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu | 100% | Menunjang |
| | | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 100% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang disediakan | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bahan/Material yang disediakan | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyelenggaraan | Jumlah Rapat | 100% | Menunjang |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------|-----------|
| | | | | rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | 100% | Menunjang |
| | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor | 100% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan | 100% | Menunjang |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|------|-----------|
| | | | | Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Jabatan terpelihara | | |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabi- litasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terehabilitasi/ter- pelihara | 100% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabi- litasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/ter- pelihara | 100% | Menunjang |
| | | | | B. PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase lembaga masyarakat aktif | 100% | Menunjang |
| | | | | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan Desa | 100% | Menunjang |
| | | | | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | 100% | Menunjang |
| | | | | C. PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap | 100% | Menunjang |



| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|------|-----------|
| | | | | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | 100% | Menunjang |
| | | | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | 100% | Menunjang |

Uraian penjelasan tabel :

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan Kinerja adalah ketiga program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Program tersebut adalah :

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- B. Program penyelengraan pemerintahan dan pelayanan publik
- C. Program penyelengraan urusan pemerintahan umum

Dari kedua program tersebut dapat diuraikan kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direalisasikan secara maksimal. Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota memperoleh capaian indikator kinerja 100%



1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memperoleh capaian indikator kinerja 100%
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya memperoleh capaian indikator kinerja 100%
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memperoleh capaian indikator kinerja 100%
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memperoleh capaian indikator kinerja 100%
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat memperoleh capaian indikator kinerja 100%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memperoleh capaian indikator kinerja 100%



Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh capaian indikator kinerja 100%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

| No. | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|-----------|---|--------------------------|-------------------|-----------|
| A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. | Rp. 1.815.749.500 | Rp. 1.798.260.936 | 99,04% |
| a.1. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 1.320.386.000 | Rp. 1.315.040.013 | 99,60% |
| a.1.1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 1.320.386.000 | Rp. 1.315.040.013 | 99,60% |
| a.2. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Rp. 11.952.000 | Rp. 11.952.000 | 100% |
| a.2.1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Rp. 11.952.000 | Rp. 11.952.000 | 100% |
| a.3. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. 146.290.250 | Rp. 139.776.677 | 95,55% |
| a.3.1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan | Rp. 4.669.000 | Rp. 4.664.900 | 99,91% |



| | | | | |
|-------------|--|------------------------|-----------------|--------|
| | Kantor | | | |
| a.3.2. | Penyediaan bahan logistik kantor | Rp. 33.280.000 | Rp. 33.262.400 | 99,95% |
| a.3.3. | Penyediaan Bahan/Material | Rp. 31.641.250 | Rp. 31.305.640 | 98,94% |
| a.3.4. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Rp. 76.700.000 | Rp. 70.543.737 | 91,97% |
| a.4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 57.925.000 | Rp. 57.925.000 | 100% |
| a.4.1. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. 57.925.000 | Rp. 57.925.000 | 100% |
| a.5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 224.052.250 | Rp. 218.619.531 | 97,58% |
| a.5.1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp. 105.562.500 | Rp. 103.402.900 | 97,95% |
| a.5.2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. 22.398.250 | Rp. 21.355.331 | 95,34% |
| a.5.3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp. 96.091.500 | Rp. 93.861.300 | 97,68% |
| a.6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 55.144.000 | Rp. 54.947.715 | 99,64% |
| a.6.1. | Penyediaan Jasa | Rp. 22.749.000 | Rp. 22.650.515 | 99,57% |



| | | | | |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. 12.895.000 | Rp. 12.797.200 | 99,24% |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp. 19.500.000 | Rp. 19.500.000 | 100% |
| B. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp. 16.153.500 | Rp. 14.621.500 | 90,52% |
| b.1. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Rp. 16.153.500 | Rp. 14.621.500 | 90,52% |
| b.1.1. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Rp. 16.153.500 | Rp. 14.621.500 | 90,52% |
| C. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN | Rp. 22.833.000 | Rp. 21.741.100 | 95,22% |



| | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|--------|
| | PEMERINTAHAN UMUM | | | |
| c.1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Rp. 22.833.000 | Rp. 21.741.100 | 95,22% |
| c.1.1. | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Rp. 22.833.000 | Rp. 21.741.100 | 95,22% |
| | JUMLAH | Rp. 1.854.736.000 | Rp. 1.834.623.536 | 98,92% |

C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

| No. | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|-----|---|-------------------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran | Realisasi | % Capaian | |
| | | | | | (Rp.) | (Rp.) | | |
| a. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | B (77,20) | B (82,41) | 106,75% | 1.854.736.000 | 1.834.623.536 | 98,92% | 7,92% |
| b. | Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | B (65) | B (64,25) | 98,85 % | 1.854.736.000 | 1.834.623.536 | 98,92% | 0% |

Uraian penjelasan tabel :

Formulasi untuk menghitung perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran sebagai berikut :

$$Tingkat\ efisiensi = \left(\frac{(\text{capaian kinerja} \times \text{pagu anggaran}) - \text{realisasi anggaran}}{\text{realisasi anggaran}} \right) \times 100\%$$

Sasaran pertama meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat pada Kecamatan Klambu tahun 2023 dengan indikator kinerja target nilai IKM sebesar 77,20 dan realisasi nilai IKM sebesar 82,41 memperoleh persentase capaian sebesar 106,75%. Sedangkan untuk pagu anggaran sebesar Rp. 1.854.736.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.834.623.536 memperoleh persentase capaian sebesar 98,92%. Jika melihat perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran pada Kecamatan Klambu mendapatkan tingkat efisiensi sebesar 7,92% dengan interpretasi efisien.

Sedangkan pada sasaran kedua meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Klambu tahun 2023 dengan



indikator kinerja target nilai SAKIP sebesar 65 dan realisasi nilai SAKIP sebesar 64,25 memperoleh persentase capaian sebesar 98,85%. Untuk pagu anggaran sebesar Rp. 1.854.736.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.834.623.536 memperoleh persentase capaian sebesar 98,92%. Jika melihat perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran tujuan dan sasaran maka mendapatkan tingkat efisiensi sebesar 0% dengan intepretasi impas.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.10

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

| No. | Program/ kegiatan | Indikator Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|-----|---|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| | | Target | Realisasi | % Capaian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian | |
| A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 100% | 100% | 100% | Rp. 1.815.749.500 | Rp. 1.798.260.936 | 99,04% | 0,97% |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | Rp. 1.320.386.000 | Rp. 1.315.040.013 | 99,60% | 0,41% |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 14 org | 14 org | 100% | Rp. 1.320.386.000 | Rp. 1.315.040.013 | 99,60% | 0,41% |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | Rp. 11.952.000 | Rp. 11.952.000 | 100% | 0,00% |
| | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | 26 stel | 26 stel | 100% | Rp. 11.952.000 | Rp. 11.952.000 | 100% | 0,00% |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100% | Rp. 146.290.250 | Rp. 139.776.677 | 95,55% | 4,66% |
| | Penyediaan Komponen Instalasi | 8 paket | 8 paket | 100% | Rp. 4.669.000 | Rp. 4.664.900 | 99,91% | 0,09% |



| | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|------|-----------------|-----------------|--------|-------|--|
| Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | | | | | | | | |
| Penyediaan bahan logistik kantor | 4 paket | 4 paket | 100% | Rp. 33.280.000 | Rp. 33.262.400 | 99,95% | 0,05% | |
| Penyediaan Bahan/Material | 27 paket | 27 paket | 100% | Rp. 31.641.250 | Rp. 31.305.640 | 98,94% | 1,07% | |
| Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | 12 laporan | 12 laporan | 100% | Rp. 76.700.000 | Rp. 70.543.737 | 91,97% | 8,73% | |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 100% | 100% | 100% | Rp. 57.925.000 | Rp. 57.925.000 | 100% | 0,00% | |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 5 unit | 5 unit | 100% | Rp. 57.925.000 | Rp. 57.925.000 | 100% | 0,00% | |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | Rp. 224.052.250 | Rp. 218.619.531 | 97,58% | 2,49% | |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 12 laporan | 100% | Rp. 105.562.500 | Rp. 103.402.900 | 97,95% | 2,09% | |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 laporan | 12 laporan | 100% | Rp. 22.398.250 | Rp. 21.355.331 | 95,34% | 4,88% | |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 laporan | 12 laporan | 100% | Rp. 96.091.500 | Rp. 93.861.300 | 97,68% | 2,38% | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | Rp. 55.144.000 | Rp. 54.947.715 | 99,64% | 0,36% | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 5 unit | 5 unit | 100% | Rp. 22.749.000 | Rp. 22.650.515 | 99,57% | 0,43% | |
| Pemeliharaan/Rehabil itasi Sarana dan Prasarana Gedung | 5 unit | 5 unit | 100% | Rp. 12.895.000 | Rp. 12.797.200 | 99,24% | 0,76% | |



| | | | | | | | | |
|-----------|--|--------|--------|------|----------------|----------------|--------|--------|
| | Kantor dan Bangunan Lainnya | | | | | | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 4 unit | 4 unit | 100% | Rp. 19.500.000 | Rp. 19.500.000 | 100% | 0,00% |
| B. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 100% | 100% | 100% | Rp. 16.153.500 | Rp. 14.621.500 | 90,52% | 10,48% |
| | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | 1 keg | 1 keg | 100% | Rp. 16.153.500 | Rp. 14.621.500 | 90,52% | 10,48% |
| | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | 1 keg | 1 keg | 100% | Rp. 16.153.500 | Rp. 14.621.500 | 90,52% | 10,48% |
| C. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | 100% | 100% | 100% | Rp. 22.833.000 | Rp. 21.741.100 | 95,22% | 5,02% |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 1 keg | 1 keg | 100% | Rp. 22.833.000 | Rp. 21.741.100 | 95,22% | 5,02% |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, | 1 keg | 1 keg | 100% | Rp. 22.833.000 | Rp. 21.741.100 | 95,22% | 5,02% |



| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Uraian penjelasan tabel :

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Kecamatan Klambu tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota memperoleh tingkat efisiensi 0,97% dengan interpretasi efisien
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memperoleh tingkat efisiensi 0,41% dengan interpretasi efisien
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memperoleh tingkat efisiensi 0,41% dengan interpretasi efisien
 2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah memperoleh tingkat efisiensi 0% dengan interpretasi impas
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya memperoleh tingkat efisiensi 0% dengan interpretasi impas
 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memperoleh tingkat efisiensi 4,66% dengan interpretasi efisien
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor memperoleh tingkat efisiensi 0,09% dengan interpretasi efisien



- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor memperoleh tingkat efisiensi 0,05% dengan interpretasi efisien
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material memperoleh tingkat efisiensi 1,07% dengan interpretasi efisien
- d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD memperoleh tingkat efisiensi 8,73% dengan interpretasi efisien
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memperoleh tingkat efisiensi 0% dengan interpretasi impas
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memperoleh tingkat efisiensi 0% dengan interpretasi impas
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memperoleh tingkat efisiensi 2,49% dengan interpretasi efisien
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat memperoleh tingkat efisiensi 2,09% dengan interpretasi efisien
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memperoleh tingkat efisiensi 4,88% dengan interpretasi efisien
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor memperoleh tingkat efisiensi 2,38% dengan interpretasi efisien
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memperoleh tingkat efisiensi 0,36% dengan interpretasi efisien
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan memperoleh tingkat efisiensi 0,43% dengan interpretasi efisien
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memperoleh tingkat efisiensi 0,76% dengan interpretasi efisien



- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memperoleh tingkat efisiensi 0% dengan interpretasi impas
- B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik memperoleh tingkat efisiensi 10,48% dengan interpretasi efisien
 1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan memperoleh tingkat efisiensi 10,48% dengan interpretasi efisien
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait memperoleh tingkat efisiensi 10,48% dengan interpretasi efisien
- C. Program Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum memperoleh tingkat efisiensi 5,02% dengan interpretasi efisien
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah memperoleh tingkat efisiensi 5,02% dengan interpretasi efisien
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia memperoleh tingkat efisiensi 5,02% dengan interpretasi efisien

BAB IV

PENUTUP





BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2023 Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan menetapkan sebanyak 1 tujuan, 2 sasaran dengan 2 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102,80% (kategori sangat tinggi). Nilai ini diperoleh dari nilai rata-rata pencapaian sasaran.
- Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaran pelayanan umum kepada masyarakat terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 106,75% (kategori sangat baik)



- Sasaran Meningkatnya kualitas kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 98,85% (kategori sangat baik)

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.854.736.000 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.834.623.536 dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 serapan anggaran sebesar 98,92% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 1,10%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Grobogan.

Klambu, Juni 2024

CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN



ab.
RUSLAMAJI, S.S.T.P. M.SI.,

Pembina, IV/a

NIP. 19871013 200602 1 002



LAMPIRAN – LAMPIRAN



LAMPIRAN

SK TIM SAKIP



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN KLAMBU

Jalan Raya Klambu Kudus Nomor 30, Klambu, Grobogan, Jawa Tengah 58154,
Telepon (0292) 77002858
Laman klambu.kec.grobogan.go.id, Pos-el kecamatanklamby@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.8.6.3/01/KECKLMB/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024**

CAMAT KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviue Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dengan Keputusan Camat Klambu Kabupaten Grobogan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;



6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas:
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
 - c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain:
 1. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
 3. Proses Bisnis Perangkat Daerah;
 4. Dokumen Keterkaitan Perangkat Daerah;
 5. Laporan Kinerja;
 6. Perjanjian Kinerja;
 7. Pengukuran Kinerja;
 8. LKJIP Perangkat Daerah;
 9. DPA Perangkat Daerah;
 10. Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 11. Rencana Aksi Perangkat Daerah;
 12. Cascading Perangkat Daerah;
 13. Review dan Evaluasi Kinerja.
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Klambu Kabupaten Grobogan



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Klambu
Pada tanggal : 16 Januari
2024





LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 000.8.6.3/01/KECKLMB/2024
TANGGAL : 16 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|----------------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Rustamaji, S.STP., M.Si. | Camat Klambu | Penanggung Jawab |
| 2. | Jaidah, S.Sos., M.M. | Sekretaris Kecamatan Klambu | Ketua |
| 3. | Endar Prasetyo Aji, S.Sos. | Kasubag Umum dan Kepegawaian | Sekretaris |
| 4. | Hari Widodo, S.Sos. | Kasi Pelayanan Umum | Anggota |
| 5. | Sukarno, S.Sos | Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota |
| 6. | Abdul Rois, S.H. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Anggota |
| 7. | Tri Agus Suprihadi, S.Sos. | Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat | Anggota |
| 8. | Arif Adinugroho, AMd. Kom. | Plt. Kasubag Keuangan | Anggota |
| 9. | Muhamad Nur Huda, S.H.I. | Staf | Anggota |
| 10. | Yasin Yusuf | Staf | Anggota |

CAMAT KLAMBU

RUSTAMAJI





LAMPIRAN

TABEL MATRIKS RENSTRA



Tabel Matriks Renstra

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--|--|---|--|--|--------|--------------|--------------|---|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|----|----------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 7.01.01 | Meningkatkan kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan | Meningkatnya kualitas pelayanan umum kepada masyarakat | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA. | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100. | | | 418 | 2,290,999,200 | 428 | 2,300,938,889 | 428 | 2,336,342,477 | 518 | 2,401,184,928 | 519 | 2,419,084,884 | | | Kecamatan Klambu | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|---|---|---|---------|--------------|--------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah | | Dokumen | | | | | | | 1 | 22555000 | 1 | 22555000 | 1 | 22555000 | | | |
| | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100 | % | | | 14 | 1,807,492,000 | 14 | 1,888,751,534 | 14 | 1,894,868,477 | 100 | 1,909,007,928 | 100 | 1,911,794,884 | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|-----------------------------------|---|---|-------------|--------------|--------------|---|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN | | bulan | | | 14 | 1,807,492,000 | 14 | 1,888,751,534 | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | Orang/Bulan | | | | | | | 14 | 1,872,313,477 | 100 | 1,886,452,928 | 100 | 1,889,239,884 | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|--|---|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100 | % | | | 14 | 20,212,000 | 14 | 11,524,000 | 14 | 11,524,000 | 18 | 11,524,000 | 19 | 12,067,000 | | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | | Stel | | | 24 | 20,212,000 | 18 | 11,524,000 | | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|--|--|--|--------|--------------|--------------|---|-----|-------------|-----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | Paket | | | | | | | 18 | 11,524,000 | 18 | 11,524,000 | 19 | 12,500,000 | | | | |
| | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100 | % | | 100 | 167,161,200 | 100 | 166,263,000 | 100 | 186,437,000 | 100 | 190,081,000 | 100 | 195,651,000 | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|--|--|---|--------|--------------|--------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | | Unit | | | 129 | 8,372,000 | 135 | 8,806,000 | 142 | 9,306,000 | 146 | 9,806,000 | 150 | 10,306,000 | | | |
| | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | Paket | | | | | | | | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|----------------------------------|---|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | | Unit | | | 5505 | 40,195,000 | 5505 | 42,985,000 | 5505 | 34,955,000 | 5,505 | 36,925,000 | 5,505 | 38,895,000 | | | |
| | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | Paket | | | | | | | 5505 | 34,955,000 | 5,505 | 36,925,000 | 5,505 | 38,895,000 | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|--|--|---|---------|--------------|--------------|---|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | | Unit | | | 288 | 4,200,000 | 288 | 5,200,000 | 288 | 5,700,000 | 288 | 4,640,000 | 288 | 4,640,000 | | | |
| | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | | Dokumen | | | | | | | 288 | 5,700,000 | 288 | 4,640,000 | 288 | 4,640,000 | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|--------------------------------|---|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bahan/Material yang disediakan | | Unit | | | 2709 | 42,606,200 | 2715 | 36,272,000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | | Paket | | | | | | | 2725 | 37,272,000 | 2,730 | 38,470,000 | 2,733 | 39,570,000 | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|--|---|---|---------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Kali | | | 858 | 71,788,000 | 970 | 73,000,000 | 12 | 79,204,000 | 12 | 80,240,000 | 12 | 82,240,000 | | | |
| | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Laporan | | | | | | | 12 | 79,204,000 | 12 | 80,240,000 | 12 | 82,240,000 | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|--|---|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | | | Keluarga | | | | | | | 1000 | 20.000.000 | 1000 | 20.000.000 | 1000 | 20.000.000 | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|---|--|--|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100 | % | | | 100 | 59,537,000 | 100 | 45,000,000 | 100 | 40,000,000 | 100 | 77,500,000 | 100 | 78,000,000 | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|---------------|--------|---------|--|---|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | | Unit | | | 11 | 59,537,000 | 12 | 45,000,000 | | | | | | | | | | | |
| | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | | Unit | | | | | | | 12 | 30,000,000 | 12 | 67,500,000 | 10 | 68,000,000 | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|--|--|--|--------|--------------|--------------|---|-----|-------------|-----|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | Unit | | | | | | | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | 1 | 10.000.000 | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100 | % | | | 175,554,000 | 100 | 142,544,355 | 100 | 152,557,000 | 100 | 157,057,000 | 100 | 162,557,000 | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|--------------------------------|---|---|---------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia | | bulan | | | 12 | 67,640,000 | 100 | 58,000,000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Laporan | | | | | | | 12 | 59,000,000 | 12 | 60,000,000 | 12 | 61,000,000 | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|---|--|---|---------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | bulan | | | 12 | 31,000,000 | 100 | 27,487,355 | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | Laporan | | | | | | | 12 | 34,000,000 | 12 | 35,000,000 | 12 | 36,000,000 | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|---------------------------------------|--|---|---------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor | | bulan | | | 12 | 76,914,000 | 100 | 57,057,000 | | | | | | | | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | Laporan | | | | | | | 12 | 59,557,000 | 12 | 62,057,000 | 12 | 65,557,000 | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|---|--|---|---------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | Jumlah peralatan kantor kecamatan terpelihara dengan baik | Per sen | | | 100 | 61,043,000 | 100 | 46,856,000 | 100 | 50,956,000 | 100 | 56,015,000 | 100 | 59,015,000 | | | |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara | | unit | | | 6 | 21,713,000 | 100 | 12,505,000 | | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|---|--|---|--------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | Unit | | | | | | | 5 | 13,005,000 | 6 | 13,505,000 | 6 | 14,005,000 | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|--|---|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terhabilitasi/terpelihara | | unit | | | 100 | 22,795,000 | 100 | 17,351,000 | | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|--|--|---|--------|--------------|--------------|---|-----|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | | | | | | | | | 5 | 19,451,000 | 5 | 23,510,000 | 5 | 25,510,000 | | | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihara | | unit | | 100 | 16,535,000 | 100 | 17,000,000 | | | | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|----------------|--------|---------|--|---|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | | Unit | | | | | | | 15 | 18,500,000 | 15 | 19,000,000 | 15 | 19,500,000 | | | | |
| 7.01.02 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap | Jumlah dan jenis layanan di kecamatan yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100 | bulan | | | 12 | 17,814,800 | 1 | 18,814,800 | 1 | 19,314,000 | 1 | 20,314,000 | 1 | 21,314,000 | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|---|--|---|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | 7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Persentase pemenuhan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang menghasilkan rekomendasi | Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang mendapatkan rekomendasi dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100 | | | | 12 | 17,814,800 | 1 | 18,814,800 | 1 | 19,314,000 | 1 | 20,314,000 | 1 | 21,314,000 | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|---|--|---|---------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | 7.01.02.2.0 1.01 Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Musrenbang Kecamatan) | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | | Kali | | | 1 | 17,814,800 | 1 | 18,814,800 | | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | Laporan | | | | | | 1 | 19,314,000 | 1 | 20,314,000 | 1 | 21,314,000 | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|----------------|--------|---------|---|---|---|--------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|-----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 7.01.03 | | | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase lembaga masyarakat aktif | | | | | - | - | 12,500,000 | - | 35,000,000 | - | - | - | 40,000,000 | | | PMD | |
| | | | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa | | | | | - | | 12,500,000 | | 35,000,000 | | - | | 40,000,000 | | | PMD | |
| | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah kegiatan pemantauan Musrenbangdes | | | | | | | | 12 | 35,000,000 | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|---|---|---|--------------------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawah Perencanaan Pembangunan di Desa | | Lembaga Masyarakat | | | | | | | | | | | 1 | 35,000,000 | | | |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb) | | | | | | 12 | 12,500,000 | | | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|---|--|---|---------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | Laporan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Persentase sarana dan prasarana kelurahan hasil pemberdayaan masyarakat dalam kondisi baik | | | | | - | | - | | - | | - | | - | | | | PMD |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|--|--|---|--------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | Jumlah kegiatan Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan | Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang dibangun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan (PKK, UMKM, Produk Unggulan, Wisata Unggulan dsb) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Evaluasi Kelurahan | Jumlah dokumen evaluasi kelurahan yang tersusun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|---|--|--|---------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|-----|------------|-----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan | persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang mendapatkan pembinaan | | | | | - | | | | - | | - | | - | | | | PMD |
| | | | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah anggota lembaga kemasyarakatan yang mengikuti peningkatan kapasitas | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.01.04 | | | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif | Jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) aktif dibagi jumlah Linmas (di Kecamatan dan Desa/Kelurahan) Aktif | per sen | | | - | | - | | 13,000,000 | 144 | 29,000,000 | 110 | 7,500,000 | | | | TRANTIBUM |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|---|--|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|----------------------|----|-----------------------------|-----------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah pemenuhan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan dikali 100 | persen | | | | | | | | 100 | 5,000,000 | 100 | 5,000,000 | 100 | 7,500,000 | | | TRANTIBUM |
| | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi Forkompimcam | | Kegiatan | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|---|--|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|-----------|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | Laporan | | | | | | | 12 | 3,000,000 | | | | | | | |
| | | | Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah kegiatan koordinasi FKUB | | Kegiatan | | | | | | | | | 1 | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|--|---|---|---------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|-----------|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | | Laporan | | | | | | | 12 | 3,000,000 | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|---------------|--------|---------|---|---|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|--|-----------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| | | | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | jumlah kegiatan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | Jumlah pelaksanaan koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menghasilkan rekomendasi dibagi jumlah kegiatan koordinasi penerapan dan penegakan Perda dan Perkada dikali 100 | kegiatan | | | | - | 10 | - | 10 | | 10 | | 10 | | | | | | TRANTIBUM |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|---|---|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi/S inergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah pelaksanaan patroli penertiban trantibum | | kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|---------------|--------|---------|--|---|---|---------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | |
| 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | | | |
| | | | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | | Laporan | | | | | | | | 10 | 2,000,000 | 10 | 24,000,000 | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|----------------|--------|---------|---|--|--|--------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| 7.01.05 | | | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN TAHAN UMUM | Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100 | bulan | | | 100 | 24,228,000 | 1 | 22,816,000 | 1 | 23,316,000 | 12 | 25,788,000 | 12 | 26,288,000 | | | | |
| | | | 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan | Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dibagi jumlah kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dikali 100 | bulan | | | 100 | 24,228,000 | 1 | 22,816,000 | 1 | 23,316,000 | 12 | 25,788,000 | 12 | 26,288,000 | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|--|---|---|----------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | 7.01.05.2.0 1.01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional | | kegiatan | | | 5 | 24,228,000 | 1 | 24,788,000 | | | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | | |
|---------------|--------|---------|---|--|---|--------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|--|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | |
| | | | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian | | Orang | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 250 | 25,288,000 | 250 | 25,788,000 | 5250 | 26,288,000 | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|----------------|--------|---------|---|--|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 7.01.06 | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | Persentase desa dengan tertib administrasi | Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100 | | | | | | - | | 22,300,000 | 71 | 8,500,000 | 55 | - | | | | |
| | | | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa dengan tertib administrasi | Jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah seluruh desa di kecamatan dikali 100 | | | | - | 71 | - | 58 | 22,300,000 | 71 | 8,500,000 | 55 | - | | | | |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | Kegiatan | | | | | | | | 1 | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|--|---|---|---------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----|-----------------------------|--|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | Dokumen | | | | | | | 1 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | | Desa | | | | 3 | | | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | 1 | 15.000.000 | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|--|---|---|---------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|-----------|------------|-----------|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Desa Yang Mendapatkan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | Desa | | | | 13 | | | 13 | 2,000,000 | 13 | 2,000,000 | 13 | | | | 13 |
| | | | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | | Dokumen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab | |
|---------------|--------|---------|---|---|---|---------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|-----------|------------|-----------|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|----|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| | | | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | Desa | | | | 13 | | | 13 | 2,500,000 | 13 | 2,500,000 | 13 | | | | | 13 |
| | | | Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan | | Laporan | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|--|--|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|-----------|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Desa yang mendapatkan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | Desa | | | | 13 | | | 13 | 1,500,000 | 13 | | | 13 | | | 13 |
| | | | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa | | Dokumen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | Kegiatan | | | | 1 | | | 1 | 2,500,000 | 1 | | | 1 | | | 1 |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|--|--|---|---------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa | | Laporan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Desa | | | | | | | | | | | | | | | 13 |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|---|--|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | | Dokumen | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|--|--|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | | | | | |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | 1 |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|--|---|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa | | Dokumen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | Kegiatan | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|---|---|---|----------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | Dokumen | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | jumlah Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | | Kegiatan | | | | | | | | | | | | | | | |



| Kode Rekening | Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan | Satuan | Kondisi Awal | Kondisi Awal | TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN | | | | | | | | | | | | Unit Kerja Penanggung jawab |
|---------------|--------|---------|---|--|---|--------|--------------|--------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|----------------------|----|-----------------------------|
| | | | | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | Target Akhir Renstra | | |
| | | | | | | | | | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | target | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| | | | Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan | Laporan | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |



LAMPIRAN

SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA



KEPUTUSAN KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 051.2/ 25 /IIV/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021-2026

KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan indikator yang mengindikasikan terwujudnya kinerja yang diinginkan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Tahun 2021–2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Grobogan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan tahun 2023.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam menyusun rencana



jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja.

KELIMA : Keputusan Camat Klambu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klambu
Pada tanggal, 10 April, 2023

CAMAT KLAMBU



RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.

Bimbina, IV/a

NP. 19871013 200602 1 002



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 051.2/ 25 /VII/2022
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan
2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan : Pembantu Bupati dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Kecamatan
3. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
4. Fungsi :
 - a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



CAMAT KLAMBU

RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19871013 200602 1 002



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 051.2/ 25 /VII/2023
TENTANG INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2023**

| NO. | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SAT. | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | ALASAN | PENANGGUNGJAWAB |
|-----|--|--|-------|--|---|-----------------|
| I. | Meningkatkan kapasitas SDM sarana dan Prasarana serta standar layanan dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | % | Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100. | Indikator ini dipilih sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan pemerintah dalam mewujudkan <i>good governance</i> dan manajemen kinerja yang berorientasi hasil. | Camat |
| 1. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat | Nilai LPPD | Nilai | Laporan Hasil Penilaian LPPD oleh Kemendagri | LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. | Camat |



| NO. | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SAT. | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | ALASAN | PENANGGUNGJAWAB |
|-------------|--|--|-------|--|--------|-----------------|
| A. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP | % | Jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP dibagi jumlah layanan dukungan administrasi kesekretariatan dikali 100. | | Kasi Pelayanan |
| a.1. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu | % | Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100 | | |
| a.1.1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN | bulan | Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang Tersusun Tepat Waktu | | |
| a.2. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen administrasi kepegawain tepat waktu | % | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah dokumen administrasi kepegawaian dikali 100 | | |
| a.2.1. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya | stel | Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Terpenuhi | | |
| a.3. | Administrasi Umum | Persentase pemenuhan | % | Jumlah kebutuhan | | |



| NO. | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SAT. | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | ALASAN | PENANGGUNGJAWAB |
|-------------|---|---|------|---|--------|-----------------|
| | Perangkat Daerah | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100 | | |
| a.3.1. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan | unit | Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhi | | |
| a.3.2. | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan | Unit | Jumlah Penyediaan bahan logistik kantor Terpenuhi | | |
| a.3.3. | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan | Unit | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terpenuhi | | |
| a.3.4. | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Bahan/Material yang disediakan | unit | Jumlah Penyediaan Bahan/Material Terpenuhi | | |
| a.3.5. | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD | Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | kali | Jumlah Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Terlaksana | | |
| a.4. | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu | % | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tepat waktu dibagi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam 1 tahun dikali 100 | | |



| NO. | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SAT. | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | ALASAN | PENANGGUNGJAWAB |
|-------------|---|---|--------|--|--------|-----------------|
| a.4.1. | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan | unit | Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi | | |
| a.5. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | unit | Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dibagi Jumlah kebutuhan Jasa | | |
| a.5.1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia | Bulan | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terpenuhi | | |
| a.5.2. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Bulan | Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhi | | |
| a.5.3. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor | bulan | Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terpenuhi | | |
| a.6. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah | persen | Jumlah peralatan kantor kecamatan terpelihara dengan baik | | |
| a.6.1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara | Unit | Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpenuhi | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terehabilitasi/terpelihar | unit | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | |



| NO. | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SAT. | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | ALASAN | PENANGGUNGJAWAB |
|-------------|--|--|-------|---|--------|-----------------|
| | | a | | Terlaksana | | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya terdapat/terpelihara | unit | Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Terpenuhi | | |
| B. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK | Persentase lembaga masyarakat aktif | bulan | Jumlah lembaga masyarakat aktif yang sudah menggunakan SOP tetap dibagi jumlah jenis layanan yang ada di kecamatan dikali 100 | | Kasi PMD |
| b.1. | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan Desa | | Jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan Desa yang mendapatkan rekomendasi dibagi banyaknya kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dikali 100 | | |
| b.1.1. | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait | | kali | | | |
| C. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM | Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap | | | | Kasi Kesra |
| c.1. | Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | | | | |



| NO. | TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | SAT. | FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN | ALASAN | PENANGGUNGJAWAB |
|--------|---|--|------|-----------------------------|--------|-----------------|
| c.1.1. | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemerintah dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan | | | | |



CAMAT KLAMBU

RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.

Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA



A. Kecamatan Klambu
a. Camat

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.

Jabatan : CAMAT KLAMBU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Jabatan : BUPATI Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Klambu, Januari 2023

Pihak Kedua,

SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Pihak Pertama,

RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|---------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat | Meningkatnya Rata - rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 77,20 % |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Nilai SAKIP | B (65) |



| No. | Program | Anggaran | Keterangan |
|-----|--|--------------------------|------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. | Rp. 1,605,894,656 | APBD |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp. 16,153,500 | APBD |
| 3. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp. 22,833,000 | APBD |
| | Jumlah | Rp. 1,644,881,156 | |

Klambu, Januari 2023

BUPATI GROBOGAN

CAMAT KLAMBU


SRI SUMARNI, S.H., M.M.



ROSTAMAJI, S.STP., M.Si.
Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002



LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA



A. Kecamatan Klambu
a. CAMAT KLAMBU

**PERNYATAAN PERUBAHAN KEDUA PERJANJIAN KINERJA
CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.

Jabatan : CAMAT KLAMBU

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Jabatan : BUPATI Grobogan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Klambu, Oktober 2023

Pihak Pertama,

SRI SUMARNI, S.H., M.M.



RUSTAMAJI, S.STP., M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19871013 200602 1 002



**CAMAT KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|---------|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kepada Masyarakat | Meningkatnya Rata – rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 77,20 % |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Kinerja Dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan | Nilai SAKIP | B (65) |

| No. | Program | Anggaran | Keterangan |
|-----|--|--------------------------|------------|
| 1. | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. | Rp. 1.815.749.500 | APBD |
| 2. | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Rp. 16,153,500 | APBD |
| 3. | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Rp. 22,833,000 | APBD |
| | Jumlah | Rp. 1.854.736.000 | |

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI, S.H., M.M.

Klambu, Oktober 2023
CAMAT KLAMBU



RUSTAMAJI, S.S.T.P., M.SI.
Pembina, IV/a
NIP. 19871013 200602 1 002



PEMERINTAH
KABUPATEN GROBOGAN

